

TATA KELOLA ASET FISIK AKUNTABEL MELALUI IMPLEMENTASI INVENTARISASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

Hadidah Nur El Falah¹, Ida Widianingsih², Ufa Anita Afrilia³

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi : hadidahnef@gmail.com

Submitted: 12-06-2025; Accepted: 15-07-2025; Published : 07-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tata laksana inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan aset fisik yang efektif merupakan fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. Namun, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tata laksana inventarisasi di Diskominfo Jabar belum mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, berakar pada berbagai hambatan di setiap tahapan siklus manajemen aset. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pegawai pengelola aset, observasi partisipatif, dan studi pustaka, menganalisis praktik pengelolaan aset dalam konteks administrasi pemerintahan dan prinsip best practice. Hasil utama menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang matang (ketiadaan tim formal dan rencana kerja tertulis), dominasi pencatatan manual (Excel), keterbatasan integrasi sistem informasi (SIMADA yang belum optimal, inisiatif digitalisasi awal), belum adanya database aset digital terpadu yang menghambat pelaporan, serta birokrasi yang berbelit dalam penghapusan aset menjadi hambatan fundamental. Keterbatasan kompetensi SDM dan minimnya minat staf juga memperparah kondisi ini. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan komprehensif yang mencakup pengembangan SDM, optimalisasi dan integrasi sistem informasi, serta penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset fisik di Diskominfo Jabar, guna mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan informasi publik.

Kata kunci: Pengelolaan Aset, Inventarisasi, Aset Fisik

ABSTRACT

This research deeply examines the procedures for physical asset inventory at the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of West Java Province. Effective physical asset management is a crucial foundation for good governance and optimal public service delivery. However, this study identifies that the inventory procedures at Diskominfo West Java have not yet achieved the expected efficiency and effectiveness, stemming from various obstacles across all stages of the asset management cycle. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through structured interviews with asset management officials, participatory observation, and literature review, analyzing asset management practices within the context of government administration and best practice principles. Key findings reveal that inadequate planning (lack of a formal team and written work plan), the dominance of manual recording (Excel), limited integration of information systems (suboptimal SIMADA, nascent digitalization initiatives), the absence of a unified digital asset database hindering reporting, and complex bureaucracy in asset disposal constitute fundamental challenges. Furthermore, limitations in staff competency and low staff interest exacerbate these conditions. These findings underscore the necessity for comprehensive improvements encompassing SDM development, optimization and integration of information systems, and bureaucratic simplification to enhance the efficiency, accuracy, and

**Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Barat
(Hadidah Nur, Ida Widianingsih, Ufa Anita Afrilia)**

accountability of physical asset management at Diskominfo West Java, thereby supporting principles of good governance and quality public information services.

Key word: *Asset Management, Inventory, Physical Assets*

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset fisik yang efektif merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, utamanya dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Aset-aset vital seperti infrastruktur Teknologi Informasi (TI), kendaraan, dan peralatan kantor menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, aset daerah merupakan sumber daya strategis yang memerlukan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang akurat dan tepat waktu guna memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang secara langsung berkontribusi pada transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan dalam pengelolaan aset fisik, khususnya dalam konteks pelayanan informasi publik, masih signifikan. Tingkat efektivitas pengelolaan aset daerah sangat ditentukan oleh keakuratan proses inventarisasi. Kenyataannya di lapangan kerap menghadirkan berbagai kendala. Sebagai contoh, studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun aspek pembukuan dan pelaporan telah dilaksanakan, inventarisasi masih menjadi kelemahan utama karena tidak adanya dokumen pendukung untuk tiap aset (Museliza, 2018). Kondisi ini mencerminkan bahwa kelemahan dalam inventarisasi dapat menghambat proses pengelolaan aset secara menyeluruh, terlepas dari nilai aset yang besar.

Tantangan signifikan lain yang kerap muncul adalah risiko hilangnya aset secara administratif meskipun tercatat dalam pembukuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2023) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023 menyoroti bahwa pemerintah daerah masih menghadapi

permasalahan inventarisasi aset tetap, termasuk aset yang keberadaannya tidak diketahui, dikuasai pihak lain, dan dicatat secara gabungan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa tanpa inventarisasi fisik yang akurat, keberadaan dan kondisi nyata aset menjadi tidak dapat diverifikasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kesulitan dalam pengambilan keputusan pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang kurang optimal juga dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik secara umum.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran operasional berbagai layanan, termasuk pelayanan informasi publik yang bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan aset TIK serta peralatan pendukung. Diskominfo bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK, layanan publik digital, serta pengelolaan aset pendukungnya, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan. Namun, berdasarkan observasi awal penulis selama melakukan pemagangan di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, ditemukan permasalahan aktual dalam pengelolaan aset fisik, khususnya pada peralatan dan mesin yang mendukung operasional Diskominfo. Permasalahan ini meliputi kurangnya sistem inventarisasi yang terintegrasi dan minimnya pemeliharaan preventif. Kondisi ini berpotensi signifikan menghambat efektivitas pengelolaan aset dan kualitas pelayanan informasi publik yang menjadi salah satu fokus utama Diskominfo.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menganalisis secara mendalam tata laksana inventarisasi aset fisik (khususnya objek peralatan dan mesin) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dengan mengkaji tantangan dan praktik yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis kritis dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses inventarisasi aset fisik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata laksana inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana hambatan teknis dan kelembagaan memengaruhi efektivitas proses inventarisasi aset di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat?
3. Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tata laksana inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan teknis dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas proses inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
3. Untuk merumuskan rekomendasi upaya penyelesaian hambatan teknis dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara mendalam tata laksana inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Studi ini menganalisis pengelolaan aset fisik dalam konteks administrasi pemerintahan, dengan membandingkan praktik yang ada di Diskominfo Jabar dengan prinsip-prinsip *best practice* yang ada, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah antara praktik aktual dan standar ideal, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap efektivitas inventarisasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Penulis terlibat langsung dalam proses inventarisasi aset fisik di lingkungan Diskominfo Provinsi Jawa

Barat selama periode magang. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pemangku kepentingan kunci dan observasi langsung. Wawancara terstruktur dilakukan secara tatap muka dengan salah satu pegawai pengelola aset di Diskominfo Jabar yang telah bekerja selama 2 tahun dalam mengelola aset di instansi tersebut. Observasi dilakukan di lingkungan kerja Diskominfo untuk memahami alur kerja, kendala teknis, dan implementasi prosedur inventarisasi secara langsung. Data sekunder dikumpulkan dari publikasi pemerintah, dokumen internal terkait pengelolaan aset, serta literatur ilmiah pendukung yang relevan.

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dari tanggal 4 Maret hingga 4 Juni 2024. Periode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai proses pengelolaan aset fisik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, serta mengidentifikasi tantangan yang ada secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan selama magang dan analisis mendalam terhadap implementasi inventarisasi aset fisik di Ruang E-Government Diskominfo Provinsi Jawa Barat, ditemukan bahwa tata laksana yang ada masih menyisakan ruang signifikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang pegawai pengelola aset yang berujar, "Proses inventarisasi kita memang sudah berjalan, tapi seringkali manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan sistem yang sudah ada. Kadang data di lapangan tidak sinkron dengan yang di sistem, apalagi terkait aset-aset yang terdahulu." Pernyataan ini menggarisbawahi adanya tantangan pada aspek teknis seperti keterbatasan digitalisasi, ketidaksinambungan data antar sistem, serta penanganan aset historis. Di sisi lain, hal ini juga berimplikasi pada aspek kelembagaan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dan potensi hambatan dalam pemanfaatan data aset yang akurat.

Meskipun secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menguraikan tahapan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), praktik di lapangan pada Diskominfo Jabar menunjukkan bahwa implementasi tahapan-tahapan tersebut belum

**Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Barat
(Hadidah Nur, Ida Widianingsih, Ufa Anita Afrilia)**

sepenuhnya optimal dalam mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud terlihat dalam ilustrasi berikut



Gambar 1. Alur inventarisasi aset Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No.47 Tahun 2021

Tahap Persiapan

Tahap persiapan inventarisasi di Diskominfo Jabar, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, melibatkan pembentukan tim inventarisasi dan penyiapan data awal. Dalam konteks kegiatan magang, penulis ditugaskan untuk mendata aset fisik di Ruang *E-Government*, mengingat Kartu Inventaris Ruang (KIR) untuk ruangan tersebut belum diperbaharui. Penulis diminta untuk mencatat jumlah dan kodefikasi setiap aset fisik yang ada. Dalam hal ini, persiapan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan awal terhadap kondisi aset. Adapun temuan dari hasil wawancara menunjukkan beberapa hal penting terkait persiapan inventarisasi.

Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dan wawancara, Diskominfo Jabar belum memiliki tim inventarisasi aset secara formal. Proses inventarisasi aset masih dilaksanakan dalam lingkup tim aset yang sudah ada. Pengelola BMD di Diskominfo Jabar, berdasarkan Kepgub 032/Kep.943-BPKAD/2023, terdiri dari beberapa staf di sub bagian tata usaha yaitu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dengan 1 orang Pengurus Barang Pengguna/Penata Pengelola BMN dan 3 orang Pengurus Barang Pembantu (Pengatur Administrasi Sarana dan Prasarana, Pengatur Muda Tingkat I Pengadministrasi Sarana dan Prasarana serta Pengatur Muda Tingkat I Pengadministrasi Sarana dan Prasarana).

Menariknya, narasumber yang memiliki tugas utama sebagai pengelola layanan kehumasan, juga ditempatkan (dikhhususkan) dalam pengelolaan aset. Penempatan ini bersifat formalitas, dengan tujuan untuk tetap berada di Diskominfo Jabar sebelum mengusulkan menjadi fungsional. Selain itu, narasumber juga memiliki tugas tambahan sebagai pengelola sampah dan pengelola taman.

Ketidakadaan tim inventarisasi yang formal, serta penugasan yang merangkap (seperti yang dialami narasumber), menunjukkan bahwa fungsi *Organizing* belum optimal. Struktur organisasi yang belum spesifik untuk inventarisasi dapat menyebabkan tumpang tindih tugas antara staf, kurangnya fokus dimana staf yang memiliki tugas ganda mungkin tidak begitu fokus atau mendedikasikan atensinya pada inventarisasi aset dan efisiensi yang menurun dikarenakan proses inventarisasi yang menjadi kurang efisien akibat kurangnya spesialisasi. Adapun Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan tim inventarisasi yang terpisah. Namun, efektivitas inventarisasi sangat bergantung pada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan personel yang kompeten.

Adapun proses penugasan tim inventarisasi idealnya dilakukan secara penunjukan oleh pimpinan (dalam hal ini, Kepala Dinas). Penunjukan tersebut seharusnya diarahkan kepada karyawan yang minimal memiliki pengetahuan tentang aset BMD dan kemampuan mengoperasikan komputer. Namun, menurut narasumber, penugasan saat ini masih sesuai dengan Tupoksi jabatan dan belum ada pembagian *job description* khusus untuk inventarisasi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi inventarisasi aset diantaranya ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan inventarisasi serta penurunan kualitas data inventarisasi karena kurangnya fokus dan spesialisasi.

Tahap persiapan inventarisasi di Diskominfo Jabar menunjukkan adanya tantangan dalam aspek *Organizing* dan *Planning*. Meskipun upaya pelatihan telah dilakukan, pengelolaan aset masih belum optimal karena belum adanya sistem yang efektif dan efisien.

Terkait penyusunan rencana kerja, Diskominfo Jabar belum memiliki rencana kerja tertulis untuk kegiatan inventarisasi aset (sebagaimana seharusnya, yang memuat tujuan, strategi, jadwal, dan alokasi sumber daya). Meskipun demikian, Diskominfo Jabar baru akan menginisiasi penyusunan rencana kerja inventarisasi. Ketidakadaan rencana kerja tertulis menunjukkan bahwa fungsi *Planning* belum optimal. Tanpa rencana kerja, proses inventarisasi aset cenderung kurang terarah, kurang efisien, dan berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat. Adapun Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 secara eksplisit mewajibkan penyusunan rencana kerja inventarisasi (Pasal 55).

Sebelum pelaksanaan inventarisasi, diperlukan penyiapan data awal. Berdasarkan narasumber, Diskominfo Jabar menggunakan *template* data awal yang menunjukkan upaya untuk mengelola aspek *Planning*, meskipun belum ada rencana kerja formal. *Template* ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa kegiatan inventarisasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan Perda Jabar Nomor 3 Tahun 2019. Adapun data-data awal tersebut berdasarkan Perda Jabar Nomor 3 Tahun 2019 adalah *Template* Rencana Kerja Inventarisasi, *Checklist* pelaksanaan dan dokumen pendukung serta Mekanisme koordinasi antar bidang dalam satu SK Tim Inventarisasi.

No	Aktor / Jabatan Pelaksana	Aktivitas	Data Input Per Baris Aktivitas (Lihat Adu)	Waktu
1	Kasub Penganga Barang	Mengajukan surat permohonan penemuan	Laporan Monitoring	20 menit
2	Penganga Barang	Melakukan penemuan rutin terhadap BMD yang	Daftar	15 hari
3	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan dengan	Laporan pemeliharaan rutin	150 menit
4	Kasub Penganga Barang	Menyusun rencana pemeliharaan barang	Laporan pemeliharaan barang dengan formulir BMD	150 menit
5	Penganga Barang	Melakukan pemeliharaan barang sesuai jadwal	1. Lembar BMD yang akan dipelihara	15 hari
6	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan barang yang	Kartu pemeliharaan barang	150 menit
7	Penganga Barang	Melakukan laporan dan melampirkan had	Daftar had pemeliharaan barang	150 menit
8	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
9	Penganga Barang	Melakukan laporan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
10	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
11	Penganga Barang	Melakukan laporan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
12	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
13	Penganga Barang	Melakukan laporan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit
14	Penganga Barang	Melakukan had pemeliharaan dan meneliti barang	1. Laporan had pemeliharaan barang secara	150 menit

Gambar 2. *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aset Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat*

Tahap persiapan inventarisasi di Diskominfo Jabar menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan perencanaan, meskipun belum ada rencana kerja formal. Penggunaan *template* data awal merupakan langkah yang positif dalam meminimalkan risiko ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kompetensi SDM dan akurasi data.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan inventarisasi, sesuai Pasal 57 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 melibatkan kegiatan pendataan dan identifikasi aset. Observasi penulis menunjukkan bahwa proses pencatatan aset di Diskominfo Jabar sebagian besar masih dilakukan secara manual. Hal ini terlihat dari metode input kode aset satu per satu pada KIR. Meskipun terdapat SOP internal yang baru dibuat, namun masih berbentuk kertas kerja dan belum berbentuk *flowchart* (yang menunjukkan alur kerja yang jelas) karena masih dalam proses verifikasi biro organisasi. Proses pencatatan aset di Diskominfo Jabar saat ini masih dilakukan secara manual, menggunakan Microsoft Excel. Hal ini berlaku untuk semua jenis aset. Pemanfaatan Microsoft Excel sebagai alat bantu pencatatan menunjukkan belum adanya sistem yang terintegrasi dan otomatis dalam proses inventarisasi. Proses pencatatan aset fisik yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, terutama terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah inventarisasi. Dalam upaya pengelolaan aset, Diskominfo Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan terkait sistem informasi yang digunakan. Terdapat dua pendekatan utama: SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah), yang merupakan sistem terpusat yang disediakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat sebagai basis data tunggal pengelolaan aset daerah, dan inisiatif SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) internal yang dirancang oleh Diskominfo Jabar untuk kebutuhan spesifiknya.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				METU BAKU		KETERANGAN	
		Penganga Barang	Penganga Barang	Unit Penganga	Kasub Penganga Barang	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Melakukan identifikasi barang berdasarkan pedoman kodeklasifikasi barang	x				1. Pedoman Kodeklasifikasi Barang 2. Berita Acara Survei Inventarisasi barang	1 hari	Data barang yang sudah diidentifikasi berdasarkan kodeklasifikasi barang	SOP Penganga BMD
2	Melakukan pencatatan awal barang hasil identifikasi	x				Data barang yang sudah diidentifikasi berdasarkan kodeklasifikasi	1 hari	Buku Inventaris Barang	
3	Mendokumentasikan daftar barang pada buku inventaris barang	x				Buku Inventaris Barang	1 minggu	Buku Inventaris Barang	Tergantung Lokasi Barang
4	Apakah barang sudah di label? Ya. Di labelkan pada aktivitas nomor 1 Tidak. Di labelkan pada aktivitas berikutnya					Buku Inventaris Barang			
5	Melakukan label barang hanya berisi kode barang	x				Label Barang Kasub	1 minggu	Label Barang hanya berisi kode barang	
6	Melakukan label barang di lokasi penyimpanan barang		x			Daftar Barang	1 hari	Barang yang terlabel	
7	Melakukan laporan pencatatan barang fisik	x				Data barang pada SPMDA (Maklumat)	1 hari	Laporan Pencatatan Barang	Pencatatan untuk barang yang belum
8	Melakukan label barang lengkap	x				Daftar Barang yang terlabel barang lengkap	1 minggu	Barang yang terlabel barang lengkap	
9	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				Barang yang terlabel barang lengkap	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD
10	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				BMD pendimbitan barang	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD
11	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				BMD pendimbitan barang	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD
12	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				BMD pendimbitan barang	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD
13	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				BMD pendimbitan barang	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD
14	Melakukan BMD pendimbitan barang	x				BMD pendimbitan barang	1 minggu	BMD	SOP Penganga BMD

Gambar 3. *Standar Operasional Prosedur Pencatatan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat*

**Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Barat
(Hadidah Nur, Ida Widianingsih, Ufa Anita Afrilia)**

Implementasi SIMADA dari BPKAD di Diskominfo Jabar dilaporkan belum berjalan optimal karena kendala seperti *bug* dan periode vakum operasional. Hal ini menghambat integrasi data aset Diskominfo Jabar dengan sistem SPBE yang ada, sehingga berpotensi menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Di sisi lain, meskipun Diskominfo Jabar memiliki inisiatif pengembangan SIMA internal, proses pencatatan manual yang masih dominan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya digitalisasi dan sinkronisasi data aset secara menyeluruh.

Menyadari keterbatasan ini, Diskominfo Jabar berencana menginisiasi penggunaan *QR Code* untuk mempermudah pelaksanaan inventarisasi aset fisik. Inisiatif ini mencakup rencana penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) untuk *generate QR Code* bagi semua jenis aset dan pengembangan aplikasi internal pendukungnya. Namun, rencana ini masih dalam tahap adaptasi dengan kebijakan baru dan belum dapat diterapkan secara penuh, sehingga proses inventarisasi manual masih menjadi praktik utama saat ini.

Terkait kompetensi, Narasumber menyebutkan bahwa staf belum terlatih secara memadai dalam melaksanakan inventarisasi aset. Hal ini diperparah dengan minimnya minat untuk mengelola aset di kalangan staf, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan aset. Tentang aspek motivasi, disediakan tunjangan berupa tambahan objek lainnya (TOL) dalam ketetapan Peraturan Gubernur (Pergub) yang diberikan kepada pengelola BMD. Namun, meskipun ada insentif, tantangan terkait motivasi tetap ada karena siklus aset BMD yang kompleks (terdiri dari 13 tahapan) dan adanya tantangan khusus di tahap inventarisasi, khususnya karena belum adanya sistem yang terintegrasi.

Adapun komunikasi antar anggota tim dalam pelaksanaan inventarisasi belum optimal. Komunikasi antara Sekretariat (sebagai pengumpul data) dan bidang-bidang belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh ketidaksinkronan data dengan realita di lapangan (data yang ada belum *up-to-date*). Contohnya, Sekretariat menanyakan keberadaan suatu barang yang terdaftar, namun bidang terkait menginformasikan bahwa barang tersebut sudah rusak atau hilang. Keterlambatan pembaruan

data aset (Kartu Inventaris Ruang) menjadi kendala dalam memenuhi ketentuan bahwa KIR seharusnya diperbaharui per semester berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, namun dalam praktiknya, seringkali dilakukan setahun atau dua tahun sekali.

Implementasi inventarisasi aset di Diskominfo Jabar pada tahap pelaksanaan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Proses pencatatan manual, keterbatasan efektivitas pelatihan, kurangnya motivasi staf, dan kendala komunikasi menjadi hambatan utama.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan hasil inventarisasi aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 61 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, merupakan proses krusial yang melibatkan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. Informasi yang diperoleh dari pendataan aset di setiap bidang di Diskominfo Jabar menjadi dasar penyusunan laporan inventarisasi secara keseluruhan. Proses ini melibatkan Petugas Pengelola Aset dan tim dari berbagai bidang, dengan koordinasi triwulanan oleh BPKAD sesuai format yang ditetapkan.

Secara normatif, regulasi ini menekankan komitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan standarisasi dalam pelaporan. Namun, praktik di lapangan pada Diskominfo Jabar menunjukkan adanya penyimpangan terhadap idealisme standarisasi dan efisiensi pelaporan. Hambatan utama dalam penyusunan laporan hasil inventarisasi adalah belum adanya database aset digital yang terpadu. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan dan konsolidasi data secara efisien, serta berpotensi mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu pelaporan, yang secara langsung bertentangan dengan tujuan standarisasi dan efektivitas pelaporan.

Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada beberapa pihak yaitu Pimpinan Diskominfo Jabar dan kepada seluruh pegawai. Dinyatakan bahwa laporan disampaikan tepat waktu, lengkap, dan akurat, karena memang harus mengikuti *timeline* dari BPKAD. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan hasil inventarisasi memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan aset. Informasi yang termuat dalam

laporan tersebut menjadi dasar bagi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Dengan pemetaan aset yang disusun dengan baik, pengambil keputusan dapat dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan, prioritas, dan tindakan yang diperlukan.

Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil inventarisasi memberikan dampak nyata pada pengelolaan aset. Sesuai Pasal 64 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, tindak lanjut hasil inventarisasi meliputi berbagai kegiatan, seperti pemberian label, reklasifikasi, koreksi data, pencatatan, pengalihan status penggunaan, pengeluaran internal, penarikan aset, dan penghapusan. Dalam konteks Diskominfo Jabar, hasil pendataan aset di Ruang tiap-tiap bidang akan digunakan untuk memperbaharui Kartu Inventaris Ruang (KIR). Selain itu, hasil pendataan akan dikomunikasikan kepada pegawai pengelola aset Diskominfo untuk penanganan lebih lanjut, terutama terkait dengan aset yang kodefikasinya rusak.

Setelah laporan inventarisasi dihasilkan, Diskominfo Jabar melakukan tindak lanjut berupa koreksi data yang disinkronisasikan dengan BPKAD. Proses koreksi data menunjukkan upaya untuk melaksanakan fungsi *Controlling*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data aset yang ada akurat dan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut dilakukan pada saat rekonsiliasi bersama BPKAD yang mana dilaksanakan tiap triwulan.

Proses penghapusan aset, yang diatur dalam Pasal 71 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tertinggi, yaitu Sekretaris Daerah. Proses penghapusan aset melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah, tim penilai, dan pihak terkait lainnya. Proses penghapusan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari fungsi *Controlling*, memastikan bahwa aset yang tidak lagi bermanfaat tidak membebani neraca pemerintah. Terdapat beberapa hambatan dalam proses penghapusan aset, yang meliputi: data aset yang tidak lengkap atau tidak *up-to-date* mempersulit proses penghapusan, ketidaksinkronan antara data di aplikasi (SIMADA) dan kondisi lapangan

serta birokrasi yang panjang dimana mekanisme untuk penghapusan sangat berbelit dan membutuhkan waktu yang lama.

Tahap tindak lanjut di Diskominfo Jabar menunjukkan adanya upaya untuk melakukan koreksi data dan menyinkronkan data aset dengan BPKAD. Namun, proses penghapusan aset menghadapi tantangan signifikan, terutama karena ketidaklengkapan dan ketidakmutakhiran data aset, serta birokrasi yang panjang.

Faktor Penghambat

Hambatan utama dalam pembentukan tim inventarisasi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam segi kompetensi. Meskipun BPKAD memberikan pelatihan yang difasilitasi oleh BPSDM setiap tahun, pengelolaan aset di Diskominfo Jabar masih belum bisa maksimal karena belum ada sistem yang efektif dan efisien. Kendala ini menunjukkan adanya tantangan dalam fungsi *Planning*. Perencanaan inventarisasi aset yang efektif harus mempertimbangkan ketersediaan SDM yang kompeten dan sistem yang mendukung. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam inventarisasi (Pasal 54). Pelatihan yang diberikan oleh BPKAD adalah langkah yang positif, namun perlu dievaluasi efektivitasnya dan diimbangi dengan implementasi sistem yang lebih efektif dan efisien.

Dalam praktik di lapangan, hambatan penyusunan rencana kerja inventarisasi aset yang berpotensi muncul ialah dari sisi teknis, administratif, maupun SDM. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan inventarisasi aset membutuhkan perhatian khusus terhadap berbagai aspek.

Berdasarkan observasi, hambatan utama dalam penyiapan data awal meliputi kurangnya pemahaman teknis tentang BMD (pengetahuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan ketentuan lain terkait Barang Milik Daerah), kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang memadai dalam inventarisasi serta tingginya potensi kesalahan dalam penginputan data secara manual yang menyebabkan data yang dihasilkan tidak akurat.

Adapun berdasarkan observasi, kendala utama dalam pelaksanaan inventarisasi aset meliputi kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang memadai dalam inventarisasi, penggunaan sistem SIMADA yang belum

**Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Barat
(Hadidah Nur, Ida Widianingsih, Ufa Anita Afrilia)**

optimal dan proses pencatatan yang masih manual, data aset tidak lengkap atau tidak *up-to-date* (terutama karena hanya kondisi fisik yang diperbaharui), ketidaksinkronan antara data di aplikasi (SIMADA) dan kondisi lapangan, belum ada database internal aset digital yang terpadu dan dimutakhirkan serta data aset lama yang belum tertangani dimana catatan daftar inventaris yang ada sekarang dimulai dari tahun 1972, dengan aset-aset lama yang sudah tidak diketahui keberadaannya, umur, dan nilai ekonomisnya yang sudah nol, namun masih tercatat harga perolehannya.

Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam penyusunan laporan hasil inventarisasi adalah ketiadaan database aset digital yang terpadu. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam pengumpulan dan konsolidasi data, potensi penurunan akurasi data serta keterlambatan Pelaporan.

Disamping itu, ketiadaan database aset digital yang terpadu menjadi hambatan signifikan dalam menghasilkan laporan inventarisasi yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif.

Upaya Penyelesaian Permasalahan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata laksana inventarisasi aset fisik, Diskominfo Jabar perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan sistem informasi dan digitalisasi mengingat proses inventarisasi aset di Diskominfo Jabar saat ini masih sangat bergantung pada pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel. Penggunaan SIMADA yang disediakan oleh BPKAD belum optimal, karena adanya *bug* pada sistem dan terbatasnya sosialisasi. Terkait hal ini, upaya lebih yang dapat dilakukan oleh BPKAD ialah Perbaikan dan Optimalisasi SIMADA. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh Diskominfo Jabar ialah merealisasikan Inisiatif Digitalisasi dimana Diskominfo Jabar berencana untuk mengimplementasikan penggunaan *QR code* dan mengembangkan aplikasi internal untuk mempermudah proses inventarisasi. Sementara itu, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait realisasi ini ialah memastikan aplikasi internal terintegrasi dengan SIMADA untuk menghindari duplikasi data dan

meningkatkan efisiensi, memastikan bahwa aplikasi internal memenuhi standar aplikasi internal Diskominfo dan memiliki interoperabilitas yang sesuai dengan sistem lain serta mempertimbangkan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* untuk *men-generate QR code* secara otomatis, yang akan mempermudah dan mempercepat proses inventarisasi.

Terkait peningkatan kompetensi SDM, beberapa upaya yang dapat dilakukan ialah memberikan pelatihan yang lebih terfokus dan berkelanjutan kepada staf mengenai pengelolaan aset, termasuk kodefikasi, klasifikasi, dan penilaian aset, menugaskan staf yang memiliki minat dan kompetensi dalam pengelolaan aset serta memberikan kesempatan pengembangan karir bagi staf yang berkinerja baik dalam pengelolaan aset.

Perihal penyederhanaan dan peningkatan efisiensi, beberapa upaya yang dapat dilakukan ialah menyederhanakan prosedur internal inventarisasi aset, mengotomatisasi proses inventarisasi dan penghapusan aset dengan memanfaatkan teknologi informasi (misalnya, penggunaan *QR code*), mendorong partisipasi aktif dari seluruh staf pengelola aset Diskominfo Jabar dalam proses inventarisasi dengan menekankan pentingnya proses inventarisasi yang baik dalam mendukung operasional instansi.

SIMPULAN

Analisis inventarisasi aset fisik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat menunjukkan tata laksana yang belum optimal di seluruh tahapan, yang berakar pada beberapa hambatan fundamental. Secara teoritis, perencanaan yang kurang matang (ketiadaan tim formal dan rencana kerja tertulis), kurangnya kompetensi dan motivasi SDM, serta minimnya sosialisasi pentingnya pengelolaan aset, menciptakan landasan yang rapuh bagi efektivitas manajemen aset publik (Sugiama, 2013, dalam Lestari, 2021).

Pada tahap pelaksanaan, dominasi pencatatan manual dan keterbatasan integrasi sistem informasi (SIMADA yang belum optimal dan inisiatif digitalisasi yang masih awal) secara signifikan menghambat efisiensi dan akurasi, sebuah isu yang umum dihadapi dalam transisi digitalisasi pemerintahan tanpa infrastruktur yang memadai (Widodo, 2020).

Hambatan krusial pada pelaporan adalah ketiadaan database aset digital terpadu, yang secara praktis sangat melemahkan fungsi kontrol dan pengambilan keputusan strategis berbasis data karena ketidakmampuan menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu (Rahayu & Prasetyo, 2019).

Tahap tindak lanjut juga terpengaruh oleh masalah data yang tidak lengkap dan birokrasi yang berbelit, terutama dalam proses penghapusan aset, yang mengganggu aspek akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset negara (Nugroho & Sari, 2021).

Secara keseluruhan, perbaikan komprehensif yang mencakup pengembangan SDM, optimalisasi dan integrasi sistem informasi, serta penyederhanaan birokrasi sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan aset fisik di Diskominfo Jabar, guna mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik..

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, penulis merekomendasikan serangkaian langkah strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan penekanan pada prioritas dan penanggung jawab spesifik. Pertama, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas mendesak yang harus ditangani oleh Diskominfo Jabar melalui Bidang Pengelola Aset atau Unit Pembinaan Kepegawain. Langkah konkret yang disarankan meliputi penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan yang terarah mencakup substansi teknis pengelolaan aset (klasifikasi, kodefikasi, penggunaan SIMADA, dan teknologi pendukung seperti *QR Code/AI*).

Kedua, optimalisasi dan integrasi Sistem Informasi menjadi prioritas tinggi yang memerlukan kolaborasi intensif antara Diskominfo Jabar (Tim IT dan Bidang Pengelola Aset) serta BPKAD Provinsi Jawa Barat. Upaya ini mencakup advokasi ke BPKAD untuk perbaikan SIMADA dan percepatan integrasi data, serta percepatan pengembangan aplikasi internal Diskominfo Jabar yang terintegrasi secara *real-time* dengan SIMADA pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Diskominfo Jabar disarankan untuk memulai dengan studi banding dengan lembaga yang sukses mengimplementasikan sistem serupa (seperti PT. Telkom), mengembangkan prototipe/*pilot*

project aplikasi internal sebagai *proof of concept*, dan menyusun *roadmap* pengembangan aplikasi yang jelas untuk pengajuan dukungan pimpinan. Penerapan *QR Code* secara bertahap untuk aset kritikal juga merupakan bagian dari strategi digitalisasi ini.

Ketiga, penyederhanaan proses administrasi dan standarisasi menjadi prioritas menengah yang dapat diupayakan oleh Diskominfo Jabar (Bidang Pengelola Aset, Biro Organisasi, dan Pimpinan Diskominfo Jabar). Tindakan yang dapat diambil meliputi digitalisasi SOP menjadi *flowchart* yang jelas, penyederhanaan prosedur birokrasi penghapusan aset (melalui koordinasi dengan BPKAD dan unit terkait Pemda), serta penegakan standar pembaruan data aset (KIR) secara berkala sesuai ketentuan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini secara terpadu, Diskominfo Jabar diharapkan dapat mencapai sistem inventarisasi aset fisik yang lebih efisien, akurat, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2023. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.360 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Dan Pengelolaan Aset TIK. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Indonesia.

Buku

- Lexy J. Moleong. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Turban, E. ., Leidner, D. ., McLean, E. ., & Wetherbe, J. 2018. Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley & Sons.
- Uma Sekaran, Roger Bougie. 2016. Research

**Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika Provinsi Jawa Barat
(Hadidah Nur, Ida Widianingsih, Ufa Anita Afrilia)**

- Methods for Business: A Skill-Building Approach. 7th ed. John Wiley & Sons.
- Wahyuni Sri, and MEcDev Rifki Khoirudin. 2020. PENGANTAR MANAJEMEN ASET.
- Artikel/Jurnal Ilmiah**
- Amrie Firmansyah. 2023. "Optimalisasi SIMAN Dan SIMAK-BMN: Solusi Teknologi Untuk Transparansi Dan Efisiensi BMN Di Indonesia." Wahana Akuntansi 18(2).
- Lalu Muhammad Taufikurrahman. 2023. "Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur." Jurnal Solusi Dan Harapan Terapan (JSHT) 3(1).
- Luki Karunia, R., and Maulana Malik Ibrahim Politeknik STIA LAN Jakarta. 2021. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. Vol. 3.
- Museliza, V. (2018). Evaluasi pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kota Pekanbaru. El-Riyasah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 9(2), 55–66.
- Nikita Mononimbar, V. F. Wowiling, H. R. Tolosang. 2018. "Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada DPKAD Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA) 6(4).
- Nugroho, R., & Sari, D. (2021). Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah: Studi kasus penghapusan aset. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 7(1), 78–90.
- Nurhaeni, A., & Novitasari, E. (2021). Urgensi Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah. Unes Journal of Social and Justice (UJSJ), 1(2), 155–166.
- Rahayu, S., & Prasetyo, B. (2019). Pentingnya database terpadu dalam manajemen aset daerah. Jurnal Manajemen Aset Publik, 5(2), 123–134.
- Sari, R. ., Rahayu, S. ., & Widyaningrum, W. 2023. "Pengaruh Manajemen Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo)." Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis 8(2).
- Supriadi, Yusup. 2021. Inventarisasi Aset Daerah Di SMPN 1 Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
- Suryani La Dama. 2023. "Analisis Strategi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buru Selatan." Jurnal Tata Kelola Dan Pelayanan Publik (JTKPP) 4(2).
- Widodo, J. (2020). Tantangan digitalisasi sektor publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 45–56.
- Report**
- Aisyah. 2021. Pengaruh Good Governance Pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. 2023. Pedoman Manajemen Aset TIK.
- Ikatan Penilai Indonesia. 2007. Standar Penilaian Indonesia Edisi VI Tahun 2007.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. "Opname Fisik Persediaan."
- Webpage**
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi. 2023. "Pengelolaan Aset Daerah." <https://bpkad.bekasikota.go.id/blogs/aset/pengelolaan-aset-daerah>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." <https://kbbi.web.id/inventarisasi>.
- Bimtek Diklat Indonesia. 2024. "Bimtek Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Program Dan Kegiatan Di Daerah." <https://www.bimtekdiklat.co.id/bimtek-permendagri-no-7-tahun-2024/>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. 2023. "Diskominfo Kembangkan Inovasi Pengelolaan Aset TIK." <https://spbe.grobogan.go.id/diskominfo-kembangkan-inovasi-pengelolaan-aset-tik/>.

- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. "SPBE - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." <https://wiki.jogjaprov.go.id/en/diskominfo/SPBE>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2023. "Pengelolaan Aset Digital Negara: Tantangan Dan Potensi Di Era Ekonomi Digital" Author Dire." <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watamphone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3731-pengelolaan-aset-digital-negara-tantangan-dan-potensi-di-era-ekonomi-digital.html>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2023. "Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Aset Negara Yang Likuid." <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watamphone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3736-tantangan-dan-peluang-dalam-pengelolaan-aset-negara-yang-likuid.html>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2024. "Pengelolaan Aset Negara Yang Inovatif." <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watamphone/id/profil/189-berita/3676-pengelolaan-aset-negara-yang-inovatif.html>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2024. "Transformasi Digital: Masa Depan Tata Kelola Aset Negara Yang Transparan." <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watamphone/id/profil/309-artikel/3856-transformasi-digital-masa-depan-tata-kelola-aset-negara-yang-transparan.html>.
- Kementerian Keuangan RI. 2022. "Inventarisasi BMN untuk Pengelolaan Aset Negara yang Lebih Baik." <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/artikel/inventarisasi-bmn-untuk-pengelolaan-aset-negara-yang-lebih-baik-672137>.
- Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN). 2025. "Menata Ulang Pengelolaan Aset Daerah." <https://diklatlpkn.id/2025/05/11/menata-ulang-pengelolaan-aset-daerah/>.
- Media Center Kota Palangka Raya. 2024. "Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Secara Transparan Dan Akuntabel."
- OCBC NISP. 2021. "Aset Adalah: Pengertian Dan Jenis-Jenisnya Yang Perlu Diketahui." <https://www.ocbc.id/article/2021/06/15/aset-adalah>.
- Ramadhan, Ahmad. 2020. "Pengertian Inventarisasi." https://www.academia.edu/42785975/Pengertian_Inventarisasi.